

Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.April.15/1
Judul	: <b>MERAJUT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PENGHASIL DAN SEKITAR TAMBANG</b>	Tanggal	: 15 April 2015
Sub Judul	: <i>(Mendorong Kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dan Distribusi DBH Migas Untuk Desa)</i>	Tahun	: 2015
		Penulis	: <b>Triono Hadi</b>

**MERAJUT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PENGHASIL DAN SEKITAR TAMBANG**  
*(Mendorong Kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dan Distribusi DBH Migas Untuk Desa)*

Rerata tahun 2010 – 2014, penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumberdaya alam (SDA) berkontribusi sebesar 41,2 persen dari total pendapatan yang diterima. Dari total DBH-SDA tersebut, sekitar 95 persen berasal dari DBH Migas. Artinya lebih dari sepertiga penerimaan daerah Kabupaten Indragiri Hulu bersumber dari DBH Migas. Dimana realisasi penerimaan daerah dari tahun 2010 -2014 sebesar Rp. 6,1 triliun dan penerimaan yang berasal dari DBH Migas sebesar Rp. 2,1 Triliun, atau 35,4 persen.

Realitas diatas menunjukkan bahwa minyak dan gas bumi terbukti masih menjadi sumber daya alam yang strategis, baik secara politik maupun ekonomi bagi kabupaten Indragiri Hulu. Namun dalam skala mikro, kita masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan dan permasalahan infrastruktur di daerah penghasil minyak dan gas bumi. Kemiskinan di Indragiri Hulu tergolong kecil data Badan Pusat Statistik tahun 2013 menunjukkan secara persentase penduduk miskin sebanyak 29.600 jiwa atau 7,50 persen dari total penduduk yang ada. Namun angka kemiskinan tahun 2013 justru meningkat dari tahun 2012, dimana pada tahun itu, penduduk miskin berjumlah 28.000 jiwa atau 7,17 persen dari total penduduknya. Paradoks antara daerah penghasil misgas dengan kemiksian juga ditunjukkan dari dimana kantong-kantong kemiskinan berada.

Data TNP2K tahun 2012 menunjukkan bahwa 52 persen penduduk di kecamatan Rakit Kulim yang notabennya penghasil migas justru tergolong sebagai penduduk miskin. Sama halnya dengan pembangunan infrastrukturnya ternyata daerah tersebut infrastruktur pedesaan jauh tertinggal dari desa- desa lainnya yang bukan penghasil Migas. Seperti desa Sungai Limau, desa penghasil uatama Migas yang dikelola PT. medco, justru tidak ada penerangan rumah tangga, infrastruktur jalan tidak ada yang beraspal dan kondisinya buruk. Bahkan di desa ini tepatnya didusun 4 (lokasi tambang migas berda) tahun 2014 terdapat 4 dari 7 siswa lulusan SD tidak bisa melanjutkan pendidikan tingkat SMP, bahkan tahun 2015 terdapat 4 dari 7 siswa lulusan SD tahun 2015 yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di SMP.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah tambang lainnya seperti di kecamatan lirik yang merupakan wilayah penghasil migas terbesar di kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan data TNP2K tahun 2012 tercatat, 34,7 persen rumah tangga di kecamatan ini tergolong sebagai rumah tangga miskin. yaitu dari 5999 rumah tangga sebanyak 2081 rumah tangga yang tergolong miskin. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum memberikan perhatian lebih terhadap desa – desa sekitar tambang yang ada di kabupaten Indragiri Hulu.

Problem ketimpangan pembangunan juga dirasakan di wilayah antar desa. Pendistribusian program pembangunan dan anggaran tidak merata disemua wilayah. Bahkan ada sebagian wilayah yang minim terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagian wilayah terdapat banyak pembangunan sebagian yang lain minim bahkan tidak ada sama sekali. Pemerintah tidak memerikan kepastian terhadap program pembangunan yang diusulkan oleh desa dalam setiap Musrebang tahunan. Usulan Musrebang yang diakomodir dalam APBD sangat kecil. Pemerintah Daerah sangat minim program pembangunan infrastruktur pedesaan. Tahun 2015 dalam Rencana Kerja Pemerintah, di Dinas PU pemerintah hanya merencanakan 18 kegiatan infrastruktur pedesaan. Sementara Indragiri Hulu terdapat 178 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

Disis lain, pemerintah daerah memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran berjalan yang sangat tinggi. Tahun 2014 diperkirakan SILPA tahun berjalan mencapai RP. 571,4 Milyar, atau 29,5 % dari total belanja daerah yang direncanakan pada APBD setelah Perubahan. SILPA tahun itu lebih besar dari SILPA tahun berjalan 2013 Rp. 476,6 Milyar. Namun secara umum SILPA tahun berjalan terus meningkat setiap tahun. Tahun 2010 SILPA Rp. 106 Milyar menjadi Rp. 571,4 Milyar. Tingginya sisa anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik masih kurang baik.

Dengan demikian maka pemerintah daerah Indragiri hulu harus mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Migas yang diterima untuk percepatan pembangunan dan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat sekitar tambang. Karena desa – desa penghasil dan sekitar tambang sangat resisten terdampak dari kegiatan eksploitasi Migas tersebut yang perlu mendapatkan kesitimewaan. Olehkarena itu,

kami masyarakat sekitar tambang terus berupaya mendorong pemerintah Indragiri hulu menerapkan kebijakan :

1. Pemerintah Daerah Indragiri Hulu harus membuat kebijakan penyaluran DBH Migas dan SDA sampai ke desa penghasil dan sekitar tambang, diluar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari APBN. Saat ini DBH Migas berhenti sampai ke kabupaten dan tidak dibagi hasilkan ke desa. Anggaran ini dapat mengejar ketertinggalan desa – desa yang menjadi penghasil dan sekitar lokasi pertambangan.
2. Pemerintah Daerah Indragiri Hulu perlu menerapkan sistem Pagu Indikatif Kewilayah (PIK) dalam upaya pemerataan pembangunan. Hal ini agar ada kepastian alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan di setiap wilayah. Kebijakan ini juga akan mengurangi kesenjangan pembangunan dan memberikan kepastian atas usulan masyarakat dalam setiap Musrembang dari tingkat desa.
3. Pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah tentang pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan pengelola Sumbledaya Alam khususnya Perusahaan Migas yang beroperasi di Indragiri Hulu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi operasi perusahaan.

**INDRAGIRI HULU, 25 Juli 2015**